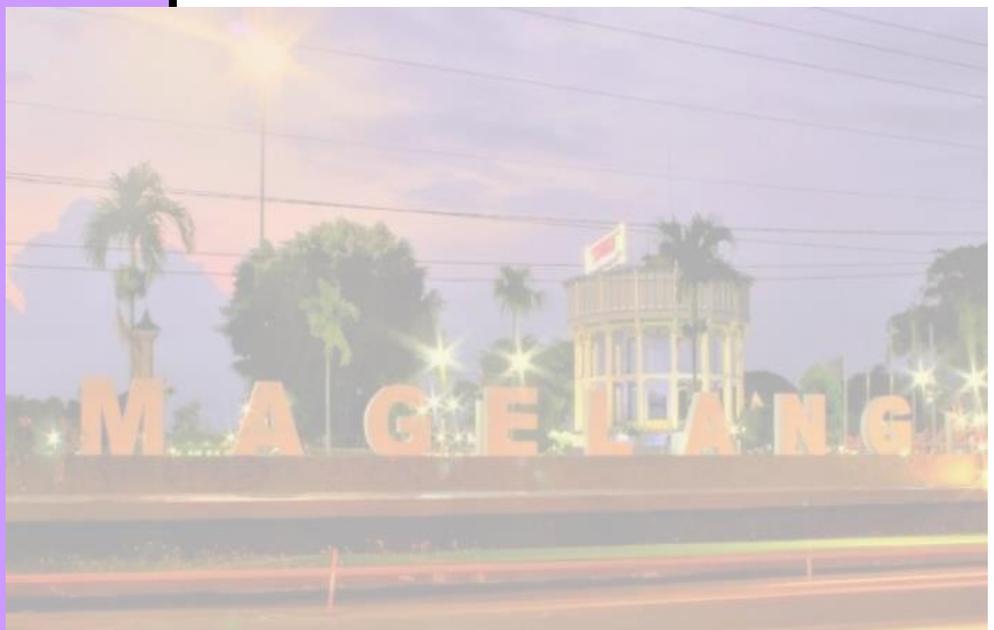




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

LKjIP 2020



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MAGELANG



LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2020

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap unsur Pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan negara diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah OPD.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah OPD merupakan pertanggungjawaban atas meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Berdasarkan hal tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan OPD Tahun 2020 sebagai media akuntabilitas dan informasi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) ini kami susun sebagai laporan pelaksanaan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang Tahun 2020.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang ini dapat memberikan informasi sebagai bahan evaluasi dan dasar perbaikan kinerja untuk tahun yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Magelang, Januari 2021

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA**



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| I.1 Latar Belakang..... | 1 |
| I.2 Maksud dan Tujuan | 2 |
| I.3 Penjelasan Umum Organisasi | 2 |
| I.4 Aspek Strategis Organisasi | 8 |
| I.5 Isu-isu Strategis Organisasi | 9 |
| | |
| BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 12 |
| II. 1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) | 12 |
| II. 2 Rencana Strategis | 13 |
| II. 3 Rencana Kinerja Tahunan..... | 16 |
| | |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... | 23 |
| III. 1 Kerangka Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja..... | 23 |
| III. 2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja..... | 25 |
| III.2.1 Terpenuhinya sarana dan Prasarana Infrastruktur Perkotaan..... | 25 |
| III. 3 Akuntabilitas Kinerja Keuangan..... | 33 |
| | |
| BAB IV PENUTUP..... | 38 |
| | |
| DAFTAR GAMBAR | |
| Gambar 1 | 3 |
| | |
| DAFTAR TABEL | |
| Tabel 1.1 | 6 |
| Tabel 1.2 | 6 |
| Tabel 1.3 | 7 |
| Tabel 1.4 | 7 |
| Tabel 2.1 | 12 |

| | |
|-----------------|----|
| Tabel 2.2 | 14 |
| Tabel 2.3 | 15 |
| Tabel 2.4 | 16 |
| Tabel 2.5 | 19 |
| Tabel 3.1 | 23 |
| Tabel 3.2 | 23 |
| Tabel 3.3 | 25 |
| Tabel 3.4 | 33 |

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang sebagai unit kerja dibawah Pemerintah Kota Magelang adalah melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kota Magelang dan mewujudkan visi pembangunan daerah Kota Magelang tahun 2016-2021 yaitu : "MAGELANG SEBAGAI KOTA JASA YANG MODERN DAN CERDAS DILANDASI MASYARAKAT YANG SEJAHTERA DAN RELIGIUS", visi pembangunan ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat kota Magelang dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Perwujudan visi tersebut ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, namun misi yang diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang adalah pada misi "MENINGKATKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN UNTUK MENDUKUNG PEMERATAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT". Pemenuhan ketersediaan infrastruktur di seluruh wilayah Kota Magelang demi terpenuhinya aspek pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang Tahun 2020. Penyusunan LKjIP, diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Mendorong Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang untuk dapat menjalankan tugas Pemerintahan dan pembangunan dengan baik dan benar, didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan yang didasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
2. Menjadikan pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang yang akuntabel, sehingga dapat mewujudkan program kegiatan yang efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang Tahun 2020, disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2016-2021,

Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Magelang 2016-2021 dan Renja DPU-PR Kota Magelang Tahun 2020.

I.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang tahun 2020 mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

- a. Bagi internal organisasi, sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang untuk perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kota Magelang dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Pemerintah Kota Magelang dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.
- b. Bagi eksternal organisasi, menjadikan LKjIP 2020 sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2020. Esensi capaian kinerja yang berhasil dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai sampai dengan tahun 2020.

I.3 Penjelasan Umum Organisasi

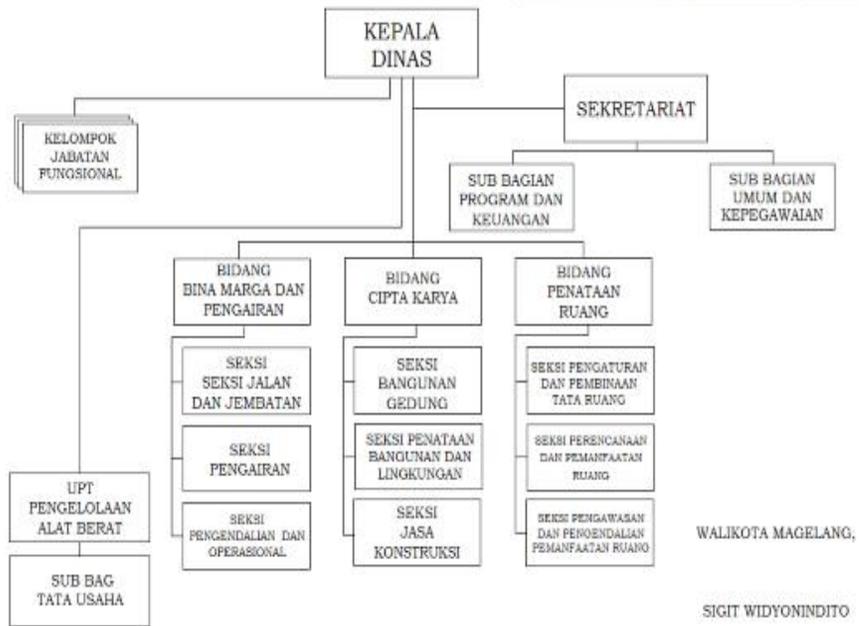
1. Struktur Organisasi :

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Magelang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang, dengan susunan organisasi sebagaimana terlihat pada :

Gambar 1.

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 32 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MAGELANG

BAGAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA MAGELANG
TIPE C



2. Tugas dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang menggunakan susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah. Sesuai dengan Perda tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Perda Nomor 1 Tahun 2016 tersebut merupakan pengganti Peraturan daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Perda Nomor 4 Tahun 2008 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Untuk penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang sesuai PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG mempunyai beberapa fungsi. Adapun fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Magelang dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok tersebut adalah sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas fungsinya.

3. Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang yang terdiri dari :

- I. Kepala Dinas
- II. Sekretaris

Dibawah Sekretariat Dinas adalah sebagai berikut :

- a) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
- b) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

III. Kepala Bidang Bina Marga dan Pengairan

Dibawah Kepala Bidang Bina Marga dan Pengairan adalah sebagai berikut :

- a) Kepala Seksi Jalan dan Jembatan
- b) Kepala Seksi Pengairan
- c) Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional

IV. Kepala Bidang Cipta Karya

Dibawah Kepala Bidang Cipta Karya adalah sebagai berikut :

- a) Kepala Seksi Bangunan Gedung
- b) Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan
- c) Kepala Seksi Jasa Konstruksi

V. Kepala Bidang Penataan Ruang

Dibawah Kepala Bidang Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

- a) Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang
- b) Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang
- c) Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

VI. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Alat Berat

Dibawah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Alat Berat adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Alat Berat

4. Keadaan Pegawai

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) Kota Magelang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang terbagi atas 3 (Tiga) Bidang, 1 (Satu) Sekretariat dan 1 UPTD. Sedangkan jumlah pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Magelang sampai dengan Januari 2020 berjumlah 54 orang dengan komposisi sebagai berikut :

❖ Menurut Jenis Kelamin :

Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang menurut Jenis Kelamin lebih didominasi oleh pegawai dengan jenis kelamin laki-laki atau sebesar 83,33 % dari total pegawai sebagaimana tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang Menurut Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | Jumlah | Prosentase |
|----|---------------|--------|------------|
| 1 | Laki-laki | 45 | 83,33 % |
| 2 | Perempuan | 9 | 16,67 % |
| | | 54 | 100,00 % |

Sumber : Data Kepegawaian DPU Kota Magelang, 2020

❖ Menurut Tingkat Pendidikan :

Tingkat pendidikan pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang sebagian besar adalah Sarjana dan Sarjana Muda atau sebesar 50,00% dari total pegawai sebagaimana tabel 1.2:

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang Menurut Tingkat Pendidikan

| No | Pendidikan | Jumlah | Prosentase |
|----|-----------------------|--------|------------|
| 1 | Pasca Sarjana/ S2 | 6 | 11,11% |
| 2 | Sarjana/ Sarjana Muda | 27 | 50,00% |
| 3 | SMA dan sederajat | 15 | 27,78% |
| 4 | SMP dan sederajat | 2 | 3,70% |
| 5 | SD dan sederajat | 4 | 7,41% |
| | | 54 | 100% |

Sumber : Data Kepegawaian DPUPR Kota Magelang, 2020

❖ Menurut Golongan/Ruang :

Komposisi pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Magelang menurut pangkat/golongan paling banyak adalah pegawai dengan golongan II atau sebesar 35,56 % dari total pegawai sebagaimana tabel 1.3 berikut :

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Magelang Menurut Golongan/Ruang

| No | Jabatan | Jumlah | Prosentase |
|----|---------------|--------|------------|
| 1 | Golongan IVB | 1 | 1,85 % |
| 2 | Golongan IVA | 2 | 3,70 % |
| 3 | Golongan IIID | 8 | 14,81 % |
| 4 | Golongan IIIC | 5 | 9,26 % |
| 5 | Golongan IIIB | 4 | 7,41 % |
| 6 | Golongan IIIA | 16 | 29,63 % |
| 7 | Golongan II | 14 | 25,93 % |
| 8 | Golongan I | 4 | 7,41 % |
| | | 54 | 100% |

Sumber : Data Kepegawaian DPU PR Kota Magelang, 2020

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa personil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang paling banyak bergolongan/ruang IIIA, sebagian dari mereka berijazah Sarjana/ Sarjana Muda.

❖ Menurut Jenjang Jabatan :

Komposisi pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Magelang Pejabat Eselon III B masih kosong diberi tugas PLT Kasubag dan dilaksanakan oleh Sekretaris DPUPR. Jabatan yang kosong adalah Kepala Bidang Penataan Ruang. Rincian komposisi pegawai adalah sebagaimana tabel 2.4 berikut:

Tabel 1.4
Komposisi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Magelang Menurut Golongan/Pangkat

| No | Golongan/Pangkat | Jumlah | Prosentase |
|----|------------------|--------|------------|
| 1 | Eselon II B | 1 | 1,85 % |
| 1 | Eselon III A | 1 | 1,85 % |
| 2 | Eselon III B | 3 | 5,56 % |
| 3 | Eselon IV A | 12 | 22,22 % |
| 4 | Eselon IV B | 0 | 0,00 % |
| 5 | Staf | 37 | 68,52 % |
| | | 54 | 100% |

Sumber : Data Kepegawaian DPUPR Kota Magelang, 2020

Berdasarkan tabel 1.4 diatas terlihat bahwa mayoritas sebanyak 68,52% karyawan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang adalah staf. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekuatan tangan kerja DPU-PR cukup signifikan untuk menjalani tugas-tugas lapangan.

I.4 Aspek Strategis Organisasi

Aspek strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang sesuai dengan Misi 3 dari Kepala Daerah Terpilih adalah meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Aspek strategis tersebut dijabarkan dalam sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang, yang terdiri dari :

- 1) Mewujudkan sarana dan prasarana infrastruktur perkotaan dalam kondisi baik ;
- 2) Mewujudkan Kota Magelang yang tertata dan terkendali penataannya.

Program-program yang menjadi prioritas unggulan terkait dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ingin dicapai tersebut, melalui:

I. Urusan Pekerjaan Umum

1. Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur
4. Program peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
6. Program Rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan
7. Program Pembangunan Saluran Drainase/ gorong-gorong
8. Program Rehabilitasi/ peningkatan Saluran Drainase/ gorong-gorong
9. Program Pengembangan kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
10. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
11. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan pengairan Lainnya

II. Urusan Penataan Ruang

1. Program Pemanfaatan Ruang
2. Program Perencanaan Tata Ruang
3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

I.5 Isu-isu Strategis Organisasi

Isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang ditentukan dengan mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perlu juga dikenali faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam pencapaian visi dan misi Walikota Magelang. Selain itu perlu dipertimbangkan hasil telaahan terhadap Renstra Provinsi Jawa Tengah, Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, RTRWK serta KLHS.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari faktor internal dan eksternal OPD. Identifikasi permasalahan dan kendala didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang adalah sebagai berikut :

1. Bidang Bina Marga dan Pengairan
 - 1) Masih perlu penambahan jaringan jalan antar wilayah di Kota Magelang
 - 2) Masih perlu peningkatan maupun penyediaan fasilitas pejalan kaki dan penyandang cacat karena merupakan bagian dari lalu lintas
 - 3) Keterbatasan staf yang produktif
 - 4) Keterbatasan staf yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa
 - 5) Kurangnya bangunan pelengkap jalan di beberapa ruas jalan
 - 6) Kondisi jaringan pedestrian yang kurang memadai, terutama yang bisa diakses penyandang cacat
 - 7) Belum optimalnya koordinasi antar OPD terkait pelaksanaan di Bidang Bina Marga
 - 8) Masih ada penyedia jasa yang berkualitas rendah
 - 9) Usia bangunan yang sudah tua menyebabkan saluran drainase tidak cukup menampung limpasan air saat terjadi hujan deras
 - 10) Semakin banyaknya perubahan fungsi saluran irigasi karena perubahan fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian dan bangunan – bangunan liar
 - 11) Semakin tingginya curah hujan yang berpotensi menyebabkan genangan dan banjir
 - 12) Adanya kejadian bencana alam, longsor, amblas yang mengancam konstruksi saluran irigasi dan drainase
 - 13) Semakin banyaknya pemanfaatan lahan irigasi yang tidak sesuai Peruntukannya

- 14) Masih kurangnya proporsi dimensi saluran drainase dengan debit air yang akan ditampung
- 15) Masih kurangnya jumlah saluran cross rain (shipon) pembuang drainase
- 16) Kurangnya peralatan pendukung untuk penanganan irigasi dan drainase
- 17) Peraturan perundang-undangan yang sering berubah sehingga menyulitkan pelaksanaan perizinan ESDM
- 18) Masih kurangnya penggunaan peralatan hemat energi di lingkungan pemerintah sehingga belum bisa mengurangi anggaran pemanfaatan energi dan belum bisa menjadi contoh bagi perkantoran swasta

2. Bidang Cipta Karya

- 1) Kurangnya dukungan data dan informasi bagi penguatan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
- 2) Belum optimalnya sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas masyarakat miskin dan difabel di perkotaan
- 3) Adanya aturan/ regulasi yang tumpang tindih menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan
- 4) Belum optimalnya koordinasi antar OPD terkait dengan pelaksanaan kegiatan di Bidang Cipta Karya
- 5) Kekurangsiapan dalam mengantisipasi kecepatan dan dinamika pertumbuhan fisik dan fungsional kawasan perkotaan, sehingga kawasan kumuh tumbuh sejalan dengan berkembangnya pusat-pusat kegiatan ekonomi
- 6) Keterbatasan staf yang produktif
- 7) Keterbatasan staf yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa
- 8) Masih kurangnya penggunaan peralatan hemat energi di lingkungan pemerintah sehingga belum bisa mengurangi anggaran pemanfaatan energi dan belum bisa menjadi contoh bagi perkantoran swasta

3. Bidang Penataan Ruang

1. Masih lemahnya penegakan hukum terhadap pemanfaatan ruang karena belum terincinya tata ruang kota Magelang.
2. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian) dikarenakan pengetahuan masyarakat yang masih kurang.

3. Surat teguran masih terbatas kepada bangunan baru yang belum mengajukan IMB, sedangkan bangunan yang sudah lama berdiri belum diberi surat teguran karena keterbatasan data dan personil tim wasmanru.
4. Perlu percepatan bangunan yang berIMB dengan program pemutihan, khususnya bagi bangunan tempat tinggal.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021. Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan mengacu pada Indikator Pemerintah Kota Magelang dan Indikator Kinerja Utama pendukung IKU Pemerintah Kota Magelang yang menjadi tugas pokok dan fungsi instansi pendukung. Disamping Indikator Kinerja Utama, Penyusunan LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang juga mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 1/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta indikator-indikator kinerja yang lain. IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang selengkapnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama DPUPR Kota Magelang Tahun 2020

| No | Indikator Kinerja Utama | Satuan |
|----|--|--------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Panjang jalan penghubung baru yang dibangun | Meter |
| 2 | Prosentase jumlah jembatan dalam kondisi baik | % |
| 3 | Prosentase panjang jalan dalam kondisi baik | % |
| 4 | prosentase panjang trotoar dalam kondisi baik | % |
| 5 | Persentase panjang drainase dalam kondisi baik | % |
| 6 | Jumlah shipon yang dibangun | Buah |
| 7 | Prosentase infrastruktur yang memenuhi standar aksesibilitas | % |
| 8 | Persentase pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh | % |
| 9 | Persentase perencanaan pembangunan gedung yang layak fungsi | % |
| 10 | Tersedianya update Badan Usaha yang mengajukan ijin usaha jasa konstruksi baik baru maupun perpanjangan | % |
| 11 | Prosentase peningkatan kualitas pelaksanaan jasa konstruksi (meliputi K3, Manajemen Konstruksi, Tenaga Ahli, Tepat Waktu dan Efisien | % |

| | | |
|----|---|---|
| 12 | Rasio ketersediaan dokumen tata ruang (RTRW, RDTRK dan RTBL) | % |
| 13 | Prosentase perijinan yang sesuai tata ruang | % |
| 14 | Rasio ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital | % |
| 15 | Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunan | % |
| 16 | Rasio reklame ber IMB persatuan perjumlah reklame berdiri | % |
| 17 | Rasio jumlah surat teguran pelanggaran tata ruang yang dikeluarkan perjumlah bangunan dan reklame yang belum ber IMB | % |
| 18 | % saluran irigasi dalam kondisi baik | % |
| 19 | Ketersediaan sarana prasarana kebinamargaan | % |

II.2 Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang yaitu mendukung visi Pemerintah Kota Magelang **“Terwujudnya Kota Magelang Sebagai Kota Jasa Yang Modern Dan Cerdas Yang Dilandasi Masyarakat Yang Sejahtera Dan Religius”**. Misi Pemerintah Kota Magelang adalah:

- 1). Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 2). Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.
- 3). Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- 4). Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang.
- 5). Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani

Berdasarkan visi misi kota, posisi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang mendukung pada perwujudan unsur visi Masyarakat Sejahtera melalui misi Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

2. Tujuan, Sasaran Strategis dan indikator kinerja

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran ini akan diterjemahkan menjadi program yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan. Proses pencapaian hasil sasaran sangat tergantung dari keberhasilan implementasi kegiatan/program. Adapun tujuan dan sasaran strategis yang merupakan penjabaran dari pernyataan visi dan misi sebagai berikut :

Tabel 2.2.

Tujuan dan sasaran strategis DPU PR Kota Magelang

| Tujuan | Sasaran Strategis |
|--|---|
| 1. Mewujudkan sarana dan prasarana infrastruktur perkotaan dalam kondisi baik | Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perkotaan |
| 2. Meningkatnya ketersediaan informasi jasa konstruksi | Meningkatnya tertib administrasi penyedia jasa konstruksi |
| 3. Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian | a. Tertib administrasi perkantoran dan kepegawaian b. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai |
| 4. Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai | a. Rasio pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran b. Persentase sarana dan prasarana kebinamargaan |
| 5. Terwujudnya pengelolaan keuangan perangkat daerah yang akuntabel | Tertib administrasi keuangan dan waktu pengiriman laporan keuangan |
| 6. Terwujudnya pengendalian operasional kegiatan dan keuangan perangkat daerah | Tertib pengendalian kegiatan dan pelaporan kinerja |

b. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran ini akan diterjemahkan menjadi program yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan. Proses pencapaian hasil sasaran sangat tergantung dari keberhasilan implementasi kegiatan/program. Adapun uraian sasaran dan indikator sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan sebagai berikut :

Tabel 2.3

Sasaran dan Indikator Sasaran DPUPR Kota Magelang

| Sasaran | Indikator Sasaran |
|---|---|
| a. Terciptanya pelayanan kepada masyarakat yang responsif, efisien dan efektif | Peningkatan pelayanan kepada masyarakat |
| a. Terwujudnya kinerja aparatur yang efektif, efisien dan akuntabel yang mencerminkan nilai-nilai good governance | Kualitas aparatur yang profesional dan berkinerja tinggi dalam pelayanan masyarakat terpenuhi |
| a. Terwujudnya pengelolaan administrasi dan keuangan dengan baik dan tertib dalam rangka profesionalisme menuju pelayanan publik yang prima | Tertib administrasi dan keuangan dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima terpenuhi Tersedianya sistem informasi jasa konstruksi setiap tahun Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN) |
| a. Terwujudnya prasarana jalan, saluran irigasi dan drainase perkotaan yang berkualitas b. Terwujudnya penyediaan air baku bagi masyarakat perkotaan | Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat Proporsi Panjang Jalan kota Magelang dengan kondisi baik Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana Tersedianya sistem jaringan drainase |

| | |
|--|---|
| | <p>skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun</p> <p>Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada</p> <p>Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari</p> |
| a. Terwujudnya pengembangan kawasan strategis sebagai simpul perekonomian, sosial, budaya dan pariwisata | Pembangunan infrastruktur di kawasan strategis terlaksana dengan baik sehingga kegiatan ekonomi, sosial budaya dan pariwisata oleh masyarakat menjadi berkembang di kawasan tersebut |
| b. Terwujudnya peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur perkotaan | Pemeliharaan/peningkatan infrastruktur jalan untuk mencapai kondisi jalan dalam keadaan baik |

II.3 Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang Tahun 2020 dapat dilihat pada matrik sebagai berikut :

Tabel 2.4.

Rencana Kinerja Tahunan DPUPR Tahun 2020

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2020

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | TARGET | PROGRAM |
|-----------|---|---|--|---|
| 3 | Terpenuhinya sarana dan prasarana infrastruktur perkotaan | 1. Panjang jalan penghubung baru yang dibangun 2. Prosentase jumlah jembatan dalam kondisi baik 3. Prosentase panjang jalan dalam kondisi baik 4. Prosentase panjang trotoar | 2242 meter 95 % 93,50% 68,59% | 1. Program Pembangunan jalan dan jembatan 2. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 3. Program Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 4. Program rehabilitasi / pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong 5. Program Rehabilitasi / |

| | | | | |
|--|--|---|-----------|---|
| | | dalam kondisi baik | 88% | pemeliharaan jalan dan jembatan |
| | | 5. Persentase panjang drainase dalam kondisi baik | | 6. Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya |
| | | 6. Jumlah shipon yang dibangun | 9 buah | 7. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah |
| | | 7. Prosentase infrastruktur yang memenuhi standar aksesibilitas | 100% | 8. Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan |
| | | 8. Jumlah wilayah strategis dan cepat tumbuh yang dibangun | 4 wilayah | 9. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan |
| | | 9. Prosentase perencanaan pembangunan gedung yang layak fungsi | 100% | 10. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh |
| | | 10. Tersedianya update Badan Usaha yang mengajukan ijin usaha konstruksi baik baru maupun perpanjangan | 78% | 11. Program pengaturan jasa konstruksi |
| | | 11. Prosentase peningkatan kualitas pelaksanaan jasa konstruksi (meliputi K3, manajemen konstruksi, tenaga ahli, tepat waktu dan efisien) | 25% | 12. Program pengawasan jasa konstruksi |
| | | 12. Rasio ketersediaan dokumen tata ruang (RTRW, RDTRK dan RTBL) | 100% | 13. Program perencanaan tata ruang |
| | | 13. Prosentase perijinan yang sesuai tata ruang | 100% | 14. Program pemannfaatan ruang |
| | | 14. Rasio ketersediaan informasi | | 15. Program pengendalian pemanfaatan ruang |

| | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|--|
| | | <p>mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital</p> <p>15. Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunan</p> <p>16. Rasio reklame berIMB persatuan jumlah reklame berdiri</p> <p>17. Rasio jumlah surat teguran pelanggaran tat ruang yang dikeluarkan perjumlah bangunan dan reklame yang belum ber IMB</p> | <p>27%</p> <p>10%</p> <p>38%</p> | |
| | | <p>18. Prosentase saluran irigasi dalam kondisi baik</p> <p>19. Ketersediaan sarana dan prasarana bina marga</p> | <p>90%</p> <p>100%</p> | |

**PENETAPAN KINERJA
TAHUN 2020**

Tabel 2.5 Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Magelang 2020

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN (Rp) |
|-----------|---|---|--|---|---|
| 1 | Terpenuhinya sarana dan prasarana infrastruktur perkotaan | 1. Panjang jalan penghubung baru yang dibangun 2. % panjang trotoar dalam kondisi baik 3. % jumlah jembatan dalam kondisi baik 4. % panjang jalan dalam kondisi baik 5. % infrastruktur yang memenuhi standar aksesibilitas | 2242 meter 68,59% 95 % 93,50% 100% | Program Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 1. Pemeliharaan jalan 2. Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan dan Jembatab (DAK) 3. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kota Magelang 4. Rehab/Pemeliharaan Trotoar Jalan Perkotaan 5. Perencanaan/DED Rehab/pemeliharaan/peningkatan jalan (DAK) | 604.157.000 7.659.596.000 103.300.000 180.000.000 265.000.000 |

| | | | | | |
|--|--|--|---------|---|---------------|
| | | 1. Prosentase saluran irigasi dalam kondisi baik | 90% | Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya | 22.361.000 |
| | | | 4 | | |
| | | 1. % pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh | wilayah | Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh | 43.079.000 |
| | | | | 1. Penataan Kawasan Budaya Gunung Tidar | 1.299.586.000 |
| | | | | 2. Peningkatan prmbangunan sarana dan prasarana olahraga | 111.596.000 |
| | | | | 3. Pembangunan kolam renang (Tahap 7) | 61.606.000 |
| | | | | 4. Pembangunan Gardu Pandang Kawasan Gunung Tidar (Tahap 2) | |
| | | | 88% | | |
| | | 1. % panjang drainase dalam kondisi baik | 9 buah | Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong | 4.132.510.000 |
| | | 2. Jumlah shipon yang dibangun | | 1. Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan | |
| | | | 100% | | |
| | | 1. % perencanaan pembangunan gedung | | Program Perencanaan Tata Ruang | 164.450.000 |

| | | | | | |
|--|--|--|------|--|-------------|
| | | yang layak fungsi | 78% | 1. Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang RTRW/RTRK/RTBL | 105.511.000 |
| | | 2. Tersedianya update Badan Usaha yang mengajukan ijin usaha jasa konstruksi baik baru maupun perpanjangan | 25% | 2. Koordinasi Penataan Ruang Daerah | |
| | | 3. % peningkatan kualitas pelaksanaan jasa konstruksi (meliputi K3, manajemen konstruksi, tenaga ahli, tepat waktu dan efisien) | 100% | Program Pemanfaatan Ruang | 165.442.000 |
| | | 4. Rasio ketersediaan dokumen Tata Ruang (RTRW, RDTRK dan RTBL) | 100% | 1. Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang | 64.860.000 |
| | | 5. % perijinan yang sesuai tata ruang | 100% | 2. Sosialisasi kebijakan, norma, standard, prosedur dan manual pemanfaatan | |
| | | 6. Rasio ketersediaan informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital | 27% | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | 164.409.000 |
| | | 7. Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunan | 38% | 1. Pengawasan pemanfaatan ruang | 10.200.000 |
| | | 8. Rasio jumlah surat teguran pelanggaran tata ruang yang dikeluarkan perjumlah bangunan dan reklame yang ber IMB | | 2. Kajian Teknis dan administratif pembangunan gedung | 74.130.000 |
| | | | | 3. Fasilitasi Peran Tim Ahli Bangunan | |
| | | | | Program Pembangunan Sistem Informasi/data base Jalan dan Jembatan | 75.48.000 |
| | | | | 1. Penyusunan data dan profil OPD | |
| | | | | Program Pengaturan Jasa Konstruksi | 31.176.000 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------|
| | | | | 1. Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi | 8.261.000 |
| | | | | 2. Pembinaan jasa konstruksi | 4.800.000 |
| | | | | 3. Penyusunan Analisa Harga Standar Bangunan Konstruksi | |
| | | | | Program pengawasan jasa konstruksi | 5.400.000 |
| | | | | 1. Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi | 579.600.000 |
| | | | | 2. Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum | 11.600.000 |
| | | | | 3. Pengawasan teknis pengelola dan penyelenggaraan gedung milik daerah | |
| | | | | | 3.600.000 |
| | | | | Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan | |
| | | | | 1. Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip | |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Kerangka Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja DPUPR Kota Magelang Tahun 2020 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel III.1.

Tabel 3.1

Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja (%) | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Kode |
|----|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| 1 | 91 ≤ 100 | Sangat baik | Hijau Tua |
| 2 | 76 ≤ 90 | Tinggi | Hijau Muda |
| 3 | 66 ≤ 75 | Sedang | Kuning Tua |
| 4 | 51 ≤ 65 | Rendah | Kuning Muda |
| 5 | ≤ 50 | Sangat Rendah | Merah |

Keterangan : Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan yang telah ditetapkan oleh DPUPR Kota Magelang dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis DPUPR Kota Magelang beserta target dan capaian realisasinya dirinci seperti pada tabel III.2 di bawah ini :

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Tahun 2020

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Persentase | |
|----|---|-------------------|---|-------------------|------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Terpenuhinya sarana dan prasarana infrastruktur perkotaan | 1 | Panjang Jalan penghubung baru yang dibangun | 2242 meter | 2055 meter | 91,66% |
| | | 2 | % Panjang trotoar dalam kondisi baik | 68,59% | 74,95% | 109,27% |

| | | | | | | |
|---|---|----|---|-----------|-----------|---------|
| | | 3 | % jumlah jembatan dalam kondisi baik | 95% | 96,20% | 104,57% |
| | | 4 | % panjang jalan dalam kondisi baik | 93,5% | 94,63% | 101,21% |
| | | 5 | % infrastruktur yang memenuhi standar aksesibilitas | 100% | 74,95% | 74,95% |
| | | 6 | pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh | 4 wilayah | 4 wilayah | 100% |
| | | 7 | % panjang drainase dalam kondisi baik | 88% | 92,44% | 105,05% |
| | | 8 | Jumlah shipon yang dibangun | 9 buah | 9 buah | 100% |
| | | 9 | % perencanaan pembangunan gedung yang layak fungsi | 100% | 40% | 40% |
| | | 10 | Tersedianya update Badan Usaha yang mengajukan ijin usaha jasa konstruksi baik yang baru maupun perpanjangan | 78% | 79,10% | 101,41% |
| | | 11 | % peningkatan kualitas pelaksanaan jasa konstruksi (meliputi K3, manajemen konstruksi, tenaga ahli, tepat waktu dan efisien) | 25% | 100% | 400% |
| | | 12 | % saluran irigasi dalam kondisi baik | 90% | 81% | 90% |
| 2 | Terwujudnya bangunan gedung yang sesuai dengan ketentuan tata ruang dan tata bangunan | 13 | Rasio ketersediaan dokumen tata ruang (RTRW, RDTRK dan RTBL) | 100% | 8,33% | 8,33% |
| | | 14 | % perijinan yang sesuai tata ruang | 100% | 100% | 100% |
| | | 15 | Rasio ketersediaan informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital | 100% | 16,67% | 16,67% |
| | | 16 | Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunan | 27% | 26,12% | 96,74% |

| | | | | | | |
|--|--|----|--|-----|-------|-------|
| | | 17 | Rasio jumlah surat teguran pelanggaran tata ruang yang dikeluarkan perjumlah bangunan dan reklame yang ber IMB | 38% | 2,15% | 5,66% |
|--|--|----|--|-----|-------|-------|

Dari tabel di atas terdapat 2 sasaran strategis yang terbagi ke dalam 17 indikator, pada tahun 2020 target indikator – indikator tersebut harus dipenuhi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan melaksanakan program dan kegiatannya di tahun tersebut.

III.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis DPUPR Kota Magelang yang dicerminkan dalam capaian indikator kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

III.2.1. Terpenuhinya sarana dan prasarana infrastruktur perkotaan

Tabel 3.3
Target Dan Realisasi Indikator Sasaran 2020

| NO | SASARAN INDIKATOR | CAPAIAN KONDISI 2016 | 2020 | | | TARGET AKHIR RPJMD 2021 | CAPAIAN AKUMULATIF sd 2020 TERHADAP RPJMD 2021 |
|--|---|----------------------|------------|------------|-------------|-------------------------|--|
| | | | TARGET | REALISASI | % REALISASI | | |
| Terpenuhinya sarana dan prasarana infrastruktur perkotaan | | | | | | | |
| 1 | Panjang jalan penghubung baru yang dibangun | 0 meter | 2242 meter | 2055 meter | 91,66% | 2242 meter | 91,66% |
| 2 | % panjang trotoar dalam kondisi baik | 63,71% | 68,59% | 74,95% | 109,27% | 71,9% | 104,24% |
| 3 | % panjang drainase dalam kondisi baik | 84% | 88% | 92,44% | 102,26% | 89% | 103,87% |
| 4 | Jumlah shipon yang dibangun | 6 buah | 9 buah | 9 buah | 100% | 10 buah | 90% |
| 5 | Tersedianya update badan usaha yang mengajukan ijin usaha jasa konstruksi baik baru maupun perpanjangan | 72% | 78% | 79,10% | 101,41% | 80% | 98,88% |

| | | | | | | | |
|----|--|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|
| 6 | % saluran irigasi dalam kondisi baik | 79% | 90% | 81% | 90% | 100% | 81% |
| 7 | Kawasan strategis yang terbangun | 4 kawasan | 4 kawasan | 4 kawasan | 100% | 4 kawasan | 100% |
| 8 | % jumlah jembatan dalam kondisi baik | 90,54% | 95% | 96,20% | 104,57% | 96% | 100,20% |
| 9 | % panjang jalan dalam kondisi baik | 86% | 93,5% | 94,63% | 101,21% | 95% | 99,61% |
| 10 | % perencanaan bangunan gedung yang layak fungsi | 100% | 100% | 40% | 40% | 100% | 40% |
| 11 | % infrastruktur yang memenuhi standar aksesibilitas | 40% | 100% | 74,95% | 74,95% | 100% | 74,95% |
| 12 | % peningkatan kualitas pelaksanaan jasa konstruksi meliputi (K3, manajemen konstruksi, tenaga ahli, tepat waktu, efisien) | 25% | 25% | 100% | 400% | 25% | 400% |
| 13 | Rasio ketersediaan dokumen tata ruang (RTRW, RDTRK dan RTBL) | 8% | 100% | 8,33% | 8,33% | 100% | 8,33% |
| 14 | Prosentase perijinan yang sesuai tata ruang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 15 | Rasio ketersediaan informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kab./kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital | 15% | 100% | 16,67% | 16,67% | 100% | 16,67% |
| 16 | Rasio bangunan | 22% | 27% | 26,12% | 96,74% | 27% | 96,74% |

| | | | | | | | |
|----|---|-----|-----|-------|-------|-----|-------|
| | ber IMB persatuan bangunan | | | | | | |
| 17 | Rasio jumlah surat teguran pelanggaran tata ruang yang dikeluarkan per jumlah bangunan dan reklame yang belum ber IMB | 25% | 38% | 2.15% | 5,66% | 38% | 5,66% |

1. Panjang jalan penghubung baru yang dibangun

Dalam rangka konektivitas antar wilayah dengan pusat – pusat keramaian Pemerintah Kota Magelang dari tahun 2016 sd 2019 telah membangun jalan penghubung baru khususnya di daerah timur dan selatan kota Magelang yaitu Jalan Penghubung Tentara Genie Pelajar – Jalan Perintis Kemerdekaan, jalan penghubung Jalan Sarwo Edhie Wibowo – Jalan Jend. Sudirman, jalan penghubung Jalan tentara Genie Pelajar dengan Perumahan Ngembik dan Jalan Penghubung Kel. Cacaban dengan Kel. Kemirirejo. Capaian di tahun 2020 adalah 91,66% , ini menunjukkan dari target 2,242 m tahun 2020 belum tercapai karena anggaran terefocusing disebabkan adanya pandemi COVID-19.

| Indikator | Tahun | | | | |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Panjang Jalan baru (m) | 942 | 1.192 | 1.712 | 2,055 | 2055 |

Sumber: DPUPR 2020

2. Persentase Panjang Trotoar dalam Kondisi Baik

Kondisi awal Tahun 2015 sepanjang 148.168 meter atau sebesar 62,30% trotoar dalam kondisi baik dari 237.830 panjang trotoar di Kota Magelang. Adapun capaian kinerja hingga Tahun 2020 sudah terdapat 179,139 meter trotoar dalam kondisi baik. Optimis target akan tercapai pada akhir RPJMD.

3. Persentase Panjang Drainase dalam Kondisi Baik

Capaian indikator kinerja hingga Tahun 2020 tercapai bahkan melampaui target. Kondisi awal dari panjang keseluruhan drainase 237,830 meter kini sudah sepanjang 219,859 meter dalam kondisi baik , Capaian setiap tahunnya mencapai target yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tiga tahun RPJMD berjalan. Gambaran pertahun sebagai berikut:

| Tahun | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Panjang Drainase (m) | 237.830 | 237.830 | 237.830 | 237.830 | 237.830 |
| Panjang Drainase dalam kondisi baik (m) | 199.777 | 202.156 | 207.534 | 209,156 | 219.859 |

Sumber, DPUPR 2020

4. Jumlah Shipon yang Dibangun

Hingga tahun 2020 Pemerintah Kota Magelang terealisasi membangun 9 shipon untuk memperlancar saluran drainase, yaitu pada persimpangan dengan jaringan irigasi.

5. Tersedianya update Badan Usaha yang mengajukan ijin usaha jasa konstruksi baik baru maupun perpanjangan

Capaian Hingga Tahun 2020 sudah ada 159 badan usaha jasa konstruksi yang mengajukan izin baru dan perpanjangan izin dari 210 jasa usaha konstruksi. Dari data tersebut capaian kinerja untuk tahun 2020 dapat terpenuhi.

6. Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik

Rasio jaringan irigasi di Kota Magelang pada tahun 2016 sd 2018 tidak banyak mengalami perubahan karena saluran irigasi yang menjadi wewenang Kota Magelang hanya saluran Kali Kota sedangkan 3 sungai yang melewati Kota Magelang yaitu, Sungai manggis, Sungai Elo dan Sungai Progo bukan wewenang Kota Magelang dalam pemeliharannya. Untuk Saluran Kali Kota panjangnya 5.000 meter, yang menjadi kendala dalam peningkatan panjang irigasi dalam kondisi baik adalah masih adanya rumah-rumah liar dan bangunan fasum diatas saluran di sepanjang kali kota serta penyempitan saluran disisi selatan, dengan gambaran data berikut:

| Tahun | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------|-------|-------|-------|------|
| Panjang Irigasi (m) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5000 | 5000 |
| Panjang Irigasi dalam kondisi baik (m) | 950 | 950 | 950 | 4,050 | 4050 |

Sumber: DPUPR, 2020

7. Persentase kawasan strategis yang terbangun

Indikator masih perlu kerja keras, karena dari target akhir sebanyak 4 kawasan, hingga Tahun 2020 masih diarahkan/dikonsentrasikan pada 2 kawasan strategis Kota yaitu Kawasan GOR Samapta dan Kawasan Gunung Tidar, namun secara total DPUPR telah membangun 4 kawasan strategis yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Magelang.

8. Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik

Indikator ini optimis akan tercapai pada akhir RPJMD, karena untuk tahun 2020 capaian kienrjanya adalah 104,57%. Jembatan dalam prasarana infrastruktur merupakan bangunan konstruksi yang sangat penting, karena gunanya adalah meneruskan jalan melalui suatu rintangan yag berada lebih rendah, rintangan ini biasanya jalan lain berupa jalan air atau lalu lintas biasa. Oleh karena itu Pemerintah Kota Magelang selalu

memelihara dan meningkatkan jembatan, karena peranan jembatan yang sangat penting dalam menopang kelancaran transportasi.

9. Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik

Jalan di Kota Magelang terbagi menjadi 2 pengelolaan berdasarkan kewenangan yaitu, Jalan milik Pemerintah Pusat/jalan nasional dan Pemerintah Kota Magelang, tahun 2016 jalan milik Pemerintah Provinsi berubah status jalannya menjadi kewenangan pengelolaan Pemerintah Kota. Secara umum kondisi jalan di Kota Magelang dalam kondisi baik. Sedangkan jalan Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No: 248/KPTS/M/2015 tanggal 23 April 2015 meliputi Jalan Ahmad Yani, Jalan Sukarno Hatta, dan Jalan Urip Sumoharjo dengan panjang total 8,430 km, sedangkan kondisi ruas – ruas jalan secara umum sebagai berikut:

| Status Jalan | Tahun | | | |
|-----------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| | 2019 | | 2020 | |
| | Panjang jalan (km) | Panjang jalan dalam kondisi baik (km) | Panjang jalan (km) | Panjang jalan dalam kondisi baik (km) |
| Kewenangan Kota | 118,915 | 111,780 | 118,915 | 112,535 |

Sumber. DPUPR, 2020

10. Prosentase perencanaan bangunan gedung yang layak fungsi

Capain indikator mencapai target yang ditetapkan setiap Tahunnya, dan ditargetkan bahwa semua gedung milik pemerintahan ada dalam kondisi yang laik fungsi, kedepan masih ada bangunan gedung yang akan direvitalisasi, bukan dalam hal kelaikan fungsi, akan tetapi dalam hal penambahan kapasitas dan penambahan fungsi lain yang lebih representatif.

11. Prosentase infrastruktur yang memenuhi standar aksesibilitas

Dalam hal aksesibilitas indikator pencapaian tersebar kedalam indikator pada urusan lain, dapat berupa bangunan gedung seperti pasar daerah, kawasan strategis daerah dan fasilitas kesehatan, sedangkan dalam hal aksesibilitas berupa trotoar yang diarahkan untuk memenuhi pencapaian target dari indikator ini, sehingga lebih realistis. Indikator ini agak tercapai, dikarenakan masih adanya pohon – pohon/tanaman dan bangunan yang berada diatas trotoar. Sampai dengan Tahun 2020 Panjang trotoar yang sudah dilengkapi sarpras aksesibilitas sepanjang 104,132 meter dari total pedestrian target di Kota Magelang yang mencapai 237,830 meter.

12. Prosentase peningkatan kualitas pelaksanaan jasa konstruksi meliputi K3, manajemen konstruksi, tenaga ahli, tepat waktu, efisien)

Capaian indikator mencapai target yang ditetapkan. Optimis indikator akan tercapai pada akhir RPJMD, karena setiap kegiatan sudah disesuaikan dengan SOP dan peraturan perundangan yang tercermin dari terbangunnya fasilitas dan layak serta pelaksanaan pekerjaannya tepat waktu sebelum tahun anggaran berakhir.

13. Rasio ketersediaan Dokumen Tata Ruang (RTRW, RDTRK, dan RTBL)

Indikator Rasio ketersediaan Dokumen Tata Ruang (RTRW, RDTRK, dan RTBL) sampai tahun 2020 baru memiliki 1 dokumen RTRW Kota Magelang atau sekitar 8,33 % dari total 12 dokumen yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kota Magelang Tahun 2011-2031, sedang target di akhir RPJMD (2021) sebanyak 12 dokumen yaitu 1 Perda RTRW , 5 perda RDTRK dan 6 perwal RTBL. Proses Revisi Perda RTRW sudah masuk tahap akhir evaluasi Gubernur Jawa Tengah setelah mendapatkan Persetujuan Substansi dari Kementerian ATR/BPN dan kesepakatan antara DPRD dan Walikota Magelang atas Revisi Perda tersebut. Sedangkan di Tahun 2020 RDTRK BWP I dan II sudah masuk proklam legislasi daerah Tahun 2020, RTBL sudah tersedia 2 raperwal yaitu Kawasan Alun-alun dan Kawasan Lembah Tidar, sedangkan di Tahun 2020 akan disusun 2 raperwal RTBL Kawasan Sidotopo dan Kawasan Sukarno Hatta.

Indikator Rasio ketersediaan Dokumen Tata Ruang (RTRW, RDTRK, dan RTBL) masih jauh dari target yang ditetapkan, keberadaan dokumen RDTRK dan RTBL yang merupakan dokumen operasional dalam penataan ruang sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan penataan ruang di Kota Magelang.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyusunan Dokumen RDTRK dan RTBL diantaranya sebagai berikut:

1. Panjangnya proses yang harus dipenuhi dalam penetapan Peraturan Daerah, saat ini prses revisi RTRW masih dalam tahap akhir Evaluasi Gubernur.
2. Banyaknya alih fungsi lahan sehingga perlu dilakukan Revisi terhadap Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Magelang sebagai dasar penetapan Raperda RDTRK.
3. Adanya kebijakan-kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi yang harus diakomodir dalam dokumen Tata Ruang yang belum jelas arahnya di daerah yaitu rencana reaktivasi kembali jalur kereta api dan kewajiban pemenuhan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
4. Harmonisasi rencana pola ruang/fungsi ruang dengan kabupaten Magelang dengan delineasi batas sesuai dengan Permendagri 64 Tahun 2017.
5. Adanya aturan-aturan baru yang harus dipenuhi terkait dengan penyusunan dokumen RTRW , RDTRK serta Proses Persetujuan Substansinya, termasuk Perpres percepatan pembangunan Nomor 79 Tahun 2019 di Purwomanggung.

Upaya yang harus dilakukan agar target Rasio ketersediaan Dokumen Tata Ruang (RTRW, RDTRK, dan RTBL) dapat terus tercapai yaitu

1. Tetap konsisten sesuai jadwal dalam memenuhi proses penetapan Dokumen RTRW, RDTRK dan RTBL. Dimana untuk Tahun 2020, Raperda revisi Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW harus bisa ditetapkan sehingga 5 (lima) Raperda RDTRK sebagai turunan dari Perda RTRW bisa ditetapkan hingga Tahun 2021.
2. Selalu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian ATR/BPN yang memberikan Persetujuan Subtansi.
3. Koordinasi dan konsolidasi dengan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam upaya harmonisasi pola ruang dan batas wilayah administrasi.

14. Prosentase perijinan yang sesuai Tata Ruang

Capaian realisasi indikator jumlah ijin Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan peruntukan sudah mencapai target yaitu 100%. Hal ini didukung oleh koordinasi yang baik antara OPD teknis yang menangani Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Perizinan. Walaupun indikator jumlah ijin Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan peruntukan ini selalu tercapai 100%, jumlah pengajuan pada Tahun 2019 yang sudah di terbitkan total mencapai 480, dengan rincian Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) sejumlah 208, Informasi Rencana Kota (IRK) sejumlah 151, dan IRK Pemutihan sejumlah 121. Kendala dalam pelaksanaan perijinan, diantaranya sebagian besar masyarakat melakukan ijin setelah ada aktivitas pembangunan, sehingga berdampak kesulitan dalam memberikan arahan kesesuaian peruntukan ruangnya. Upaya yang dilakukan dengan meningkatkan sosialisasi ke masyarakat terkait dengan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW serta meningkatkan pengendalian dan pelayanan informasi penataan ruang.

15. Rasio ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital

Indikator tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital baru tercapai 16,67% dari target yang ditetapkan di Tahun 2021 sebesar 100%. Hal ini karena Pemerintah Kota Magelang baru mempunyai 1 peta analog dari 6 peta yang seharusnya tersedia.

Kendala yang dihadapi ini yaitu belum ditetapkannya Ranperda Revisi RTRW dan Raperda 5 Raperda tentang RDTRK BWP I,II,III,IV, dan V yang menunggu hasil revisi Perda RTRW Kota Magelang. Upaya yang dilakukan untuk mendukung indikator Rasio ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital, dengan menginformasikan mengenai peta RTRW Kota Magelang ke Kelurahan dan masyarakat, selain itu informasi

mengenai RTRW Kota Magelang juga dipasang di beberapa tempat publik seperti di sekitaran Alon-alon Kota Magelang, Taman badaan, dan Kawasan Pemerintah Kota. Hal ini dapat memberikan informasi atau sosialisasi secara baik kepada masyarakat umum tentang rencana tata ruang Kota Magelang sampai Tahun 2031.

16. Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunan

Indikator Rasio Bangunan ber IMB per Satuan Bangunan ditargetkan 33% di Tahun 2021, dengan target 2020 sebesar 27% dengan jumlah bangunan sebanyak 40,602 bangunan, tercatat realisasi sebanyak 10,606 bangunan atau sebesar 26.128% yang sudah ber-IMB. Perkembangan rumah ber IMB tiap tahunnya rata-rata kurang dari 1 % atau 400 unit rumah. Untuk mencapai target 33% dibutuhkan kenaikan sebesar 7,25% atau sebanyak 2944 unit bangunan, jadi dengan sisa 2 tahun (2020 dan 2021), maka diperlukan 1472 unit bangunan per tahunnya, dipertimbangkan untuk rasionalisasi target bangunan ber IMB yang bisa dipercepat penambahannya dengan kegiatan pemutihan yang dilaksanakan DPMPTSP dengan dibantu tenaga dari DPUPR

Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota, dan oleh Pemerintah atau pemerintah provinsi untuk bangunan gedung fungsi khusus kepada pemilik bangunan gedung untuk kegiatan meliputi:

- Pembangunan bangunan gedung baru, dan/atau prasarana bangunan gedung.
- Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan.
- Pelestarian/pemugaran.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian Indikator Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunan diantaranya yaitu:

- 1). Kesadaran masyarakat dalam upaya pelaksanaan pembangunan sesuai arahan tata ruang masih rendah.
- 2). Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian) dikarenakan pengetahuan masyarakat tentang tata ruang masih kurang
- 3). Pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan kegiatan masih kurang.

Upaya yang dilakukan untuk pemenuhan target Rasio bangunan ber IMB persatuan Bangunan diantaranya:

- 1). meningkatkan pengawasan dan pengendalian secara kontinyu di seluruh wilayah Kota Magelang serta meningkatkan peran aktif kelurahan dan perangkat RT dan RW dalam pengawasan pendirian bangunan.

- 2). sosialisasi terkait Perda No. 5 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung di tiap kecamatan serta memanfaatkan papan informasi yang tersedia.
 - 3). Pemberian keringanan berupa kegiatan Pemutihan IMB kepada masyarakat terutama untuk bangunan perumahan.
 - 4). Perlu peninjauan kembali target bangunan ber IMB, dengan mempertimbangkan kemampuan pencapaian dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan serta waktu yang tersisa.
17. Rasio jumlah surat teguran pelanggaran tata ruang yang dikeluarkan per jumlah bangunan dan reklame yang belum ber- IMB
- Indikator rasio jumlah surat teguran pelanggaran tata ruang yang dikeluarkan per jumlah bangunan dan reklame yang belum ber- IMB hingga Tahun 2019 capaian kinerja sebesar 2.15% dari target tahun 2020 sebesar 38 % dan 40 % di Tahun 2021. Indikator ini tidak dapat tercapai karena yang ditegur adalah bangunan yg belum ber IMB dan masih dalam tahap kontruksi, kalo bangunan lama yang belum ber IMB dilaksanakan dengan sosialisasi.

III.3. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Tabel 3.4
Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2020

| No. | Nama OPD/Program/Kegiatan | Pagu Anggaran | SP2D | | Realisasi |
|---|--|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| | | | Rp. | % | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
| | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 78.715.620.000 | 74.884.712.996 | 95,13% | 100,00% |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | |
| 1 | Penyediaan jasa surat menyurat | 29.000 | 28.500 | 98,28% | 100,00% |
| 2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 50.000.000 | 44.997.445 | 89,99% | 100,00% |
| 3 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 27.000.000 | 17.619.725 | 65,26% | 100,00% |
| 5 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 283.000.000 | 233.493.000 | 82,51% | 100,00% |
| 6 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 157.736.000 | 157.215.928 | 99,67% | 100,00% |
| 7 | Penyediaan alat tulis kantor | 19.000.000 | 18.993.000 | 99,96% | 100,00% |
| 8 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 17.397.000 | 17.396.950 | 100,00% | 100,00% |
| 9 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 4.000.000 | 4.000.000 | 100,00% | 100,00% |

| | | | | | |
|---|---|----------------|----------------|---------|---------|
| 10 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 2.280.000 | 2.280.000 | 100,00% | 100,00% |
| 11 | Penyediaan bahan logistik kantor | 1.050.000 | 900.000 | 85,71% | 100,00% |
| 12 | Penyediaan makanan dan minuman | 32.940.000 | 29.596.000 | 89,85% | 100,00% |
| 13 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 63.750.000 | 52.100.156 | 81,73% | 100,00% |
| 14 | Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap | 305.646.000 | 285.964.689 | 93,56% | 100,00% |
| 15 | Pengelolaan administrasi kepegawaian | 3.300.000 | 3.000.150 | 90,91% | 100,00% |
| Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | | | | | |
| 16 | Pembangunan gedung kantor | 17.752.690.000 | 17.231.973.600 | 97,07% | 100,00% |
| 17 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 76.849.000 | 70.917.600 | 92,28% | 100,00% |
| 18 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 210.390.000 | 193.995.292 | 92,21% | 100,00% |
| 19 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 4.320.000 | 4.320.000 | 100,00% | 100,00% |
| 20 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 7.000.000 | 7.000.000 | 100,00% | 100,00% |
| 21 | Pemeliharaan rutin/berkala alat berat | 61.122.000 | 58.792.400 | 96,19% | 100,00% |
| 22 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | 460.000.000 | 452.900.500 | 98,46% | 100,00% |
| 23 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 87.880.000 | 81.299.600 | 92,51% | 100,00% |
| 24 | Pengadaan peralatan gedung kantor | 73.006.000 | 72.879.500 | 99,83% | 100,00% |
| 25 | Pengadaan Alat-alat pertukangan | 17.300.000 | 15.500.000 | 89,60% | 100,00% |
| Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | | | | | |
| 26 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD | 18.620.000 | 18.522.000 | 99,47% | 100,00% |
| 27 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | 3.050.000 | 3.050.000 | 100,00% | 100,00% |
| 28 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 3.050.000 | 2.900.000 | 95,08% | 100,00% |
| 29 | Penyusunan Rencana Kerja OPD | 13.127.000 | 13.109.000 | 99,86% | 100,00% |
| 30 | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD | 17.751.000 | 17.705.000 | 99,74% | 100,00% |
| 31 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD | 9.000.000 | 8.957.000 | 99,52% | 100,00% |
| Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong | | | | | |
| 32 | Pemeliharaan sarana dan prasarana drainase kota | 550.633.000 | 546.614.488 | 99,27% | 100,00% |
| Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan | | | | | |
| 33 | Pemeliharaan Jalan | 604.157.000 | 589.237.488 | 97,53% | 100,00% |
| 34 | Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK) | 7.659.596.000 | 6.892.300.000 | 89,98% | 100,00% |
| 35 | Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kota Magelang | 103.300.000 | 103.294.500 | 99,99% | 100,00% |

| | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|---------|---------|
| 36 | Rehab/Pemeliharaan Trotoar Jalan Perkotaan | 180.000.000 | 176.684.500 | 98,16% | 100,00% |
| 37 | Perencanaan/DED Rehab/pemeliharaan/peningkatan jalan (DAK) | 265.000.000 | 259.605.000 | 97,96% | 100,00% |
| | | | | | |
| Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan | | | | | |
| 38 | Penyusunan data dan profil OPD | 7.548.000 | 7.518.000 | 99,60% | 100,00% |
| Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya | | | | | |
| 39 | Pemeliharaan jaringan irigasi | 22.361.000 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya | | | | | |
| 40 | Pembangunan Talud Sungai | 1.715.000.000 | 1.667.513.500 | 97,23% | 100,00% |
| Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh | | | | | |
| 41 | Penataan Kawasan Budaya Gunung Tidar | 43.079.000 | 34.576.200 | 80,26% | 100,00% |
| 42 | Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga | 1.299.586.000 | 1.258.169.264 | 96,81% | 100,00% |
| 43 | Pembangunan Kolam Renang (Tahap 7) | 111.596.000 | 59.634.000 | 53,44% | 100,00% |
| 44 | Pembangunan Gardu Pandang Kawasan Gunung Tidar (Tahap 2) | 61.606.000 | 49.103.200 | 79,71% | 100,00% |
| Program Pengaturan Jasa Konstruksi | | | | | |
| 45 | Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi | 31.176.000 | 30.816.000 | 98,85% | 100,00% |
| 46 | Pembinaan jasa konstruksi | 8.261.000 | 8.5111.000 | 98,18% | 100,00% |
| 47 | Penyusunan Analisa Harga Standar Bangunan Konstruksi | 4.800.000 | 4.800.000 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | |
| Program pengawasan jasa konstruksi | | | | | |
| 48 | Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi | 5.400.000 | 5.400.000 | 100,00% | 100,00% |
| 49 | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum | 579.600.000 | 579.600.000 | 100,00% | 100,00% |
| 50 | Pengawasan teknis pengelola dan penyelenggaraan gedung milik daerah | 11.600.000 | 11.300.000 | 97,41% | 100,00% |
| Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong | | | | | |
| 51 | Peningkatan Saluran drainase Perkotaan | 4.132.510.000 | 3.936.433.000 | 95,26% | 100,00% |
| Program Perencanaan Tata Ruang | | | | | |
| 52 | Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan | 164.450.000 | 157.047.000 | 95,50% | 100,00% |
| 53 | Koordinasi Penataan Ruang Daerah | 105.511.000 | 102.190.000 | 96,85% | 100,00% |
| Program Pemanfaatan Ruang | | | | | |
| 54 | Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang | 167.977.000 | 167.377.000 | 99,64% | 100,00% |

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| 55 | Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang | 64.860.000 | 54.701.800 | 84,34% | 100,00% |
| Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | | | | | |
| 56 | Pengawasan pemanfaatan ruang | 164.409.000 | 162.306.000 | 98,72% | 100,00% |
| 57 | Kajian Teknis dan administratif pembangunan gedung | 10.200.000 | 10.200.000 | 100,00% | 100,00% |
| 58 | Fasilitasi Peran Tim Ahli Bangunan | 74.130.000 | 74.130.000 | 100,00% | 100,00% |
| Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan | | | | | |
| 59 | Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip | 3.600.000 | 3.600.000 | 100,00% | 100,00% |
| Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan | | | | | |
| 60 | Pengadaan alat-alat berat | 228.000.000 | 114.174.500 | 50,08% | 100,00% |
| TOTAL | | 36.447.229.000 | 34.520.327.725 | 94,71% | 100,00% |

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1. Rumah yang mempunyai IMB di Kota Magelang Baru sekitar 25%, karena kesadaran dan pengetahuan warga yang masih kurang dalam hal IMB.
2. belum ditetapkannya Ranperda Revisi RTRW dan Raperda 5 Raperda tentang RDTRK BWP I,II,III,IV, dan V yang menunggu hasil revisi Perda RTRW Kota Magelang
3. Secara umum infrastruktur di Kota Magelang sudah dalam kondisi baik, namun masih ada beberapa permasalahan mendasar antara lain belum sesuai universal design
4. Masih ada beberapa ruas jalan di Kota Magelang yang masih perlu peningkatan dan pemeliharaan secara berkala dan kontinyu untuk menjaga kondisi jalan selalu dalam kondisi baik;
5. Untuk penambahan jalan penghubung baru terkendala aset yang bukan kewenangan Pemerintah Kota Magelang;
6. Untuk ruas jalan yang masih menjadi kewenangan pusat banyak yang sudah over capacity kendaraan dan sering macet serta ruas Jalan Sukarno Hatta kondisi jalannya banyak yang berlubang, sehingga memerlukan perhatian dan koordinasi dengan pusat untuk penanganannya.
7. Dalam penanganan drainase perlu adanya penyusunan master plan drainase perkotaan di tiap kecamatan di Kota Magelang dan pemeliharaan/peningkatan saluran drainasenya.
8. Peralatan penunjang pendukung bidang pekerjaan umum masih kurang, seperti alat berat dan peralatan uji kebinamargaan.

Solusi

1. meningkatkan pengawasan dan pengendalian secara kontinyu di seluruh wilayah Kota Magelang serta meningkatkan peran aktif kelurahan dan perangkat RT dan RW dalam pengawasan pendirian bangunan.
2. Pemberian keringanan berupa kegiatan Pemutihan IMB kepada masyarakat terutama untuk bangunan perumahan.
3. Peninjauan kembali kajian terkait dengan penempatan reklame dan IMBnya
4. Mengajukan program legislasi daerah untuk pentapan Raperda RDTRK BWP III, IV, dan V menjadi Perda
5. Pembaharuan peta analog sebagai dasar evaluasi dan penyusunan Dokumen Operasional RTRW (RDTR dan RTBL)
6. Pelengkapan jalan utama kota dengan jalur pedestrian yang bai dan layak, dengan mengakomodasi universal acces design
7. Sosialisasi percepatan rekomendasi teknis perizinan Badan Usaha Jasa Konstruksi
8. Pemeliharaan saluran irigasi, dan pensertifikatan aset di Saluran milik Daerah
9. Melakukan fokus penyelesaian pada bangunan-bangunan di kawasan strategis kota terutama Kawasan GOR Samapta dan Kawasan Gunung Tidar
10. Koordinasi pengelolaan dan pengairan dengan mitra kerja BBWS Serayu Opak (Kementerian), dan Balai PSDA Progo-Bogowonto-Luk Ulo Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah
11. Penyediaan/rehabilitasi Irigasi teknis penunjang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Daerah
12. Pemenuhan kelengkapan alat kebinamargaan dan laboratorium teknis
13. Rehabilitasi Jalan Kota sesuai spesifikasi teknis dan kualitas pengaspalan jalan
14. Mempertahankan capaian kualitas pelaksanaan jasa konstruksi dengan bermitra dengan APH (kejaksaan dan kepolisian) dan praktisi dari akademisi.

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan OPD Dinas Pekerjaan Umum Kota dan Penataan Ruang Magelang, berdasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 2020 serta Penetapan Kinerja Tahun 2020 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan good governance.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Kesimpulan yang didapat dari hasil laporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang ditunjukkan dengan capaian indikator kinerja sasaran ditentukan oleh berbagai faktor, seperti sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana.
2. Dari analisis 2 (dua) sasaran, terdapat 17 (tujuh belas) indikator kinerja yang dipilih sebagai tolok ukur. Pada tahun 2020 ada 11 (sembilan) indikator kinerja yang mempunyai penilaian realisasi kinerja sangat baik, 1 (satu) indikator kinerja dengan penilaian realisasi kinerja adalah baik, 1 (satu) indikator dengan penilaian realisasi kinerja adalah sedang dan 4 (empat) indikator kinerja dengan penilaian realisasi kinerja dengan penilaian sangat rendah atau tidak tercapai target kinerjanya.
3. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi perlu diambil langkah-langkah yang sebagai berikut :
 - a). Diperlukan komitmen dari pimpinan dan segenap pegawai untuk bersama-sama agar indikator kinerja yang belum mencapai target RPJMD dan SPM dapat segera tercapai.
 - b). Perlu adanya kebijakan dan inovasi dalam penerapan dan pencapaian indikator kinerja supaya selain dapat dirasakan manfaat dari pembangunan infrastruktur oleh masyarakat, pembangunan juga dapat mengatasi permasalahan yang ada.

c). Meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian penetapan kinerja.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah tahun 2020 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan strategis periode lima tahun yang akan datang serta penyempurnaan program dan kegiatan yang diperlukan.

Magelang, Januari 2021

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA MAGELANG**



CHRISATRYA YONAS, N. B. ST
NIP. 19690527 200312 1 002